

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Peran World Food Programme (WFP) dalam Menangani Krisis Pangan di Sierra Leone Tahun 2009-2011	Rani Hariani	Persamaan pembahasan terletak pada fokus bahasan penelitian yang membahas mengenai krisis pangan.	Perbedaan penelitian terletak pada lokus yang dimana penelitian ini membahas mengenai krisis pangan yang terjadi di Sierra Leone.
2	Peranan World Food Programme (WFP) dalam menangani krisis pangan di Suriah	Olvie Tryani Pontoh	Persamaan pembahasan terletak pada fokus bahasan penelitian yang membahas mengenai krisis pangan.	Perbedaan penelitian terletak pada lokus yang dimana penelitian ini membahas mengenai krisis pangan yang terjadi di Suriah.

3	Peran UN World Food Programme dalam Penanganan Krisis Pangan dan Kelaparan: Studi Kasus “Silent Hunger” di Niger	Herjuno Ndaru dan Intan Defrina	Persamaan pembahasan terletak pada fokus bahasan penelitian yang membahas mengenai krisis pangan.	Perbedaan penelitian terletak pada lokus yang dimana penelitian ini membahas mengenai krisis pangan yang terjadi di Niger.
4	Peranan World Food Programme dalam Penanganan Krisis Pangan di Sudan Selatan	Vijay Sanjana Bangun	Persamaan pembahasan terletak pada fokus bahasan penelitian yang membahas mengenai krisis pangan.	Perbedaan penelitian terletak pada lokus yang dimana penelitian ini membahas mengenai krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan.
5	Peran World Food Programme (WFP) dalam Mengatasi	Tresnaning Rahayu	Persamaan pembahasan terletak pada fokus bahasan penelitian yang membahas	Perbedaan penelitian terletak pada lokus yang dimana penelitian ini membahas

	Krisis Pangan di Republik Demokratik Kongo Tahun 2016-2019		mengenai krisis pangan.	mengenai krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo.
--	--	--	----------------------------	---

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengkaji literatur terdahulu yang membahas hal serupa dengan penelitian ini. Tinjauan literatur dalam konteks ini merupakan uraian lengkap yang didalamnya meliputi teori, temuan juga bahan penelitian yang didapat oleh penulis yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam mengelaborasi sumber-sumber yang dikaji penulis didalam penelitian. Selain itu, tinjauan literatur juga berperan sebagai referensi dan sarana yang dapat membantu penulis dalam memahami topik yang diteliti.

Literatur pertama adalah sebuah penelitian yang berjudul “Peran World Food Programme (WFP) dalam Menangani Krisis Pangan di Sierra Leone Tahun 2009-2011” yang ditulis oleh Rani Hariani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Menurut penelitian Rani Hariani, World Food Programme (WFP) secara aktif melakukan penanganan dalam krisis pangan di Afrika Barat, khususnya di Sierra Leone. Sebuah program untuk Sierra Leone dikembangkan pada tahun 2007 oleh World Food Programme (WFP), dan diluncurkan pada tahun 2009.

Rani Hariani berusaha mengidentifikasi penyebab krisis pangan di Sierra Leone, Afrika Barat, dalam penelitiannya. Menurut penelitian Rani Hariani, krisis pangan di Sierra Leone disebabkan oleh konflik internal di negara tersebut. Ia

juga menguraikan fungsi World Food Program (WFP) di Sierra Leone. Dalam penelitiannya, Rani Hariani menggunakan teori pluralisme dari sudut pandang organisasi internasional. Protected Relief and Recovery Operations (PRRO) menargetkan krisis pangan dan komunitas rentan di desa, pinggiran kota dan kota, dan membantu pemerintah membangun kembali dari perang saudara ke pembangunan jangka panjang.

Literatur kedua adalah tesis tahun 2016 oleh OLVIE TRYANI PONTOH dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang berjudul "Peran World Food Programme (WFP) dalam Menangani Krisis Pangan di Suriah." OLVIE, penulis penelitian ini, mencoba menjelaskan isu-isu seperti kemiskinan, penyakit, kenaikan harga pangan secara global, dan konflik di Suriah, yang dianggap sebagai penyebab utama krisis pangan di negara tersebut. Berdasarkan klaim ini, penulis mencoba menjelaskan peran WFP dalam menyelesaikan krisis pangan Suriah serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi WFP dalam melakukannya. Ia kemudian memperkenalkan gagasan tentang krisis pangan, ketahanan pangan, dan organisasi internasional. Terlepas dari peran yang dijalankan WFP di Suriah, OLVIE pun membahas operasi WFP di sana secara keseluruhan dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, inisiatif WFP di Suriah akan dievaluasi berdasarkan teori Clive Archer tentang peran organisasi internasional.

Literatur ketiga yang berjudul "Peran UN World Food Programme dalam Penanganan Krisis Pangan dan Kelaparan: Studi Kasus "Silent Hunger" di Niger" yang dituliskan oleh Herjuno Ndaru dan Intan Defrina, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2005. Dalam jurnal ini, Ndaru dan Defrina

mencoba untuk mengangkat isu krisis pangan dan kelaparan yang terjadi di Niger dengan mengangkat isu "Silent Hunger".

Kedua peneliti, Ndaru dan Defrina, mengangkat isu krisis pangan yang melanda di Afrika Barat dan menghancurkan Niger dalam penelitian mereka tentang kasus "Silent Hunger". Dengan pemaparan masalah tersebut, Ndaru dan Defrina berusaha menjelaskan fungsi WFP di Niger.

Literatur keempat yaitu penelitian skripsi yang berjudul "Peranan World Food Programme dalam Penanganan Krisis Pangan di Sudan Selatan" yang ditulis oleh Vijay Sanjana Bangun, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2017. Dalam penelitiannya, Vijay mencoba memaparkan penyebab-penyebab terjadinya krisis pangan di Sudan Selatan seperti terjadinya kekeringan dan cuaca esktrim, penyakit, perubahan iklim dan juga konflik. Dari pernyataan masalah tersebut, Vijay kemudian mencoba memaparkan apa saja peranan dari WFP dalam menangani krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan. Dalam penelitiannya, Vijay menyampaikan dengan menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep food security. Penelitian ini juga menjelaskan tentang upaya dan peranan dari WFP dalam menangani krisis pangan di negara benua Afrika.

Literatur kelima yaitu sebuah skripsi yang berjudul "Peran World Food Programme (WFP) dalam Mengatasi Krisis Pangan di Republik Demokratik Kongo Tahun 2016-2019" yang ditulis oleh Tresnaning Rahayu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Indonesia, 2023. Dalam penelitiannya, Tresnaning menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah RD Kongo belum mampu mengatasi krisis pangan di dalam negaranya, dengan adanya peran dari organisasi

internasional seperti WFP, bisa menyelamatkan banyak nyawa masyarakat melalui pendistribusian bantuan darurat. Tresnaning menganalisis peran WFP dalam mengatasi krisis pangan di RD Kongo pada tahun 2016-2019 menggunakan konsep implementasi organisasi internasional. Tresnaning juga menjelaskan bahwa WFP membantu pemerintah RD Kongo agar bisa mengembangkan kapasitas negaranya, serta WFP bekerjasama dengan mitra lokal seperti kementerian RD Kongo dan mitra internasional seperti beberapa badan Persatuan Bangsa-Bangsa dan para donatur.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Untuk memenuhi kaidah-kaidah keilmuan serta dalam mempermudah proses penelitian maka perlu bagi penulis untuk memaparkan teori-teori dan konsep-konsep dari para pakar yang berkaitan dengan hal-hal yang dibahas dalam skripsi penulis sebagai landasan teori penelitian. Rangkaian teori dan konsep yang dipaparkan bersifat sebagai penunjang yang dapat membantu penulis dalam menelaah permasalahan yang diteliti sehingga terdapat relevansi antara penelitian penulis dengan teori-teori yang sudah ada. Kerangka teoritis ini juga berfungsi sebagai dasar argumentasi untuk menjawab pertanyaan terkait penelitian.

2.2.1 Human Security & Food Security

Dengan berakhirnya perang dingin, telah terjadi semacam revolusi di bidang studi keamanan, dengan para intelektual dan pembuat kebijakan mulai beralih dari pendekatan tradisional yang berpusat pada negara menuju ke pemahaman yang lebih luas tentang konsep keamanan. Perspektif yang lebih radikal, bagaimanapun, menunjukkan bahwa keamanan harus dipahami sedemikian rupa untuk merangkul

seluruh umat manusia, bukan hanya negara, dan harus fokus pada sumber-sumber bahaya selain hanya ancaman militer terhadap negara. Gagasan Human Security berangkat dari reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia seperti; terorisme, pengungsi akibat konflik, kelaparan, perdagangan manusia, pelanggaran hak asasi manusia dan penyakit menular.

Bukan kepentingan nasional yang dipertaruhkan dalam banyak konflik ini, melainkan identitas dan budaya kelompok. Perspektif ini menunjukkan bahwa pandangan realis tentang keamanan terlalu sempit untuk dimaknai. Lebih lagi, kemampuan negara untuk memberikan keamanan bagi warganya telah tergerus oleh berbagai ancaman non-militer seperti masalah lingkungan, pertumbuhan penduduk, penyakit, pengungsi, dan kelangkaan sumber daya. Pendekatan yang lebih radikal terhadap masalah keamanan manusia ini mencerminkan perhatian holistik terhadap kehidupan dan martabat manusia. Gagasan keamanan manusia (Human Security) mengajak kita untuk fokus pada kebutuhan individu untuk aman dari kelaparan, penyakit, dan penindasan, serta dilindungi dari kejadian yang mungkin merusak pola normal kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menyiratkan kebutuhan akan redistribusi kekayaan yang signifikan dari si kaya ke si miskin di tingkat global (Griffiths & O'Callaghan, 2002).

Dalam konsep Keamanan Manusia, terdapat tujuh komponen atau dimensi keamanan sebagai bagian dari Keamanan Manusia secara menyeluruh, tujuh komponen Human Security menurut UNDP 2004 yang pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara adalah:

1. Keamanan Kesehatan (Health Security)
2. Keamanan Ekonomi (Economic Security)

3. Keamanan Pangan (Food Security)
4. Keamanan Lingkungan Hidup (Environment Security)
5. Keamanan Personal (Personal Security)
6. Keamanan Komunitas (Community Security)
7. Keamanan Politik (Political Security)

Human Security menurut UNDP yang dituangkan dalam Human Development Report 1994 memiliki dua aspek utama:

1. Keamanan Manusia merupakan keamanan dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan.
2. Keamanan Manusia berarti perlindungan dari ancaman yang terjadi secara tiba-tiba dan juga perlindungan dari gangguan yang menyakitkan didalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, dalam pekerjaan atau dalam komunitas masyarakat.

Ancaman terhadap Keamanan Manusia tidak lagi hanya bersifat pribadi atau lokal atau nasional. Ancaman Human Security menjadi global: dengan obat-obatan, AIDS, terorisme, polusi, proliferasi nuklir. Kemiskinan global dan masalah lingkungan tidak mengenal batas negara. Konsekuensi suram ancaman terhadap Human Security berkeliling dunia. Dalam kesimpulan akhir, Human Security adalah anak yang hidup dan sehat, penyakit yang tidak menular, pekerjaan yang tidak terputus, ketegangan etnis yang tidak meledak dalam kekerasan, oposisi yang tidak dibungkam. Keamanan Manusia bukanlah masalah senjata, tetapi ini adalah masalah kehidupan dan martabat manusia. Oleh karena itu, The Social Summit harus mempertimbangkan untuk menyiapkan dana Keamanan Manusia Global untuk membiayai tanggapan internasional. Masalah

yang dapat ditangani oleh dana tersebut akan mencakup perdagangan narkoba, terorisme internasional, proliferasi nuklir, penyakit menular, pencemaran lingkungan, penipisan sumber daya alam, bencana alam, konflik etnis, dan arus pengungsi (United Nations Development Programme, 1994).

Sedangkan Food Security atau yang disebut juga ketahanan pangan mencakup banyak aspek yang luas. Ketahanan pangan berarti kapabilitas atau kemampuan seseorang untuk memiliki akses pangan kapan saja, di mana saja untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Krisis pangan yang ada pada sebuah negara tidak lepas dari masalah ketahanan pangan. Terjadinya krisis pangan menunjukkan bahwa situasi ketahanan pangan negara tersebut dalam keadaan yang memprihatinkan sehingga tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhan negara tersebut. Akibatnya, banyak aspek seperti kondisi fisik, mental, dan sosial yang terpengaruh. Kondisi tersebut lebih banyak menimbulkan konflik karena lebih anarkis. Pada dasarnya membahas keamanan pangan juga membahas hal-hal yang cukup kebutuhan makanan mereka. Ini termasuk ketersediaan makanan, pekerjaan, dan pendapatan. Ketiga hal ini menentukan ketahanan pangan suatu rumah tangga. Ini membuat makanan aman di rumah. Hal ini penting untuk kebutuhan pangan dan gizi dalam sebuah keluarga. Menurut Deklarasi Roma tentang Keamanan Pangan Global dan Konferensi Tingkat Tinggi pada tahun 1996, ketahanan pangan dilaksanakan jika setiap individu sudah mempunyai fisik dan keuangan yang kuat untuk memenuhi bahan makanan yang bergizi yang sesuai dengan selera individu agar terus sehat dan aktif.

Menurut konsep ketahanan pangan ada beberapa tingkatan yang dapat diterapkan untuk mengekspresikan situasi makanan, yaitu tingkat global, nasional,

regional, tingkat rumah tangga, dan individu. Inti dari konsep ketahanan pangan adalah adanya jaminan ketersediaan makanan untuk kemanusiaan dan juga menjamin setiap individu untuk mendapatkan makanan dari waktu ke waktu, jika perlu untuk dapat hidup dalam kesehatan dan bergerak yang baik. Mengenai konsep kebutuhan makanan yang dijamin dan memuaskan untuk setiap individu, juga perlu untuk memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, ketahanan pangan, budaya lokal dan berkelanjutan lingkungan dalam proses produksi dan akses ke makanan. Korelasi konsep food security atau ketahanan pangan dengan penelitian ini adalah bagaimana program-program WFP dalam menangani krisis pangan sehingga terjaminnya kebutuhan pangan di Ghana, Afrika Barat.

2.2.3 Food Crisis

Krisis pangan merupakan suatu ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurut kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.) krisis didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sangat genting, dan berbahaya dimana adanya proses yang merugikan dalam suatu Negara, perusahaan dan lingkungan. Disisi lain pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang berasal dari hayati serta air yang digunakan. Menurut PBB sendiri pangan merupakan kondisi suatu individu atau rumah tangga menerima akses secara fisik ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dan tidak berisiko kehilangan keduanya (Muchlisin Riadi, 2020). Jadi pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terpenting disamping papan, sandang, pendidikan, kesehatan karena tanpa pangan tidak ada kehidupan dan tanpa kehidupan tidak ada kebudayaan. Bila digabungkan krisis pangan ialah suatu keadaan yang sangat darurat dalam masalah ketersediaan makanan serta

masyarakat yang kekurangan asupan, Di mana terjadinya ladang penyakit serta banyaknya gizi buruk.

2.2.4 Organisasi Internasional

Bentuk kerja sama antar negara, salah satunya ditampung melalui sebuah wadah yang bernama Organisasi Internasional. Maurice Duverger mengatakan bahwa institusi atau organisasi adalah bentuk kolektif atau struktur dasar organisasi sosial yang ditetapkan oleh hukum atau tradisi manusia – baik itu perdagangan, diplomasi, konferensi, atau organisasi internasional.

Dalam bukunya yang berjudul *International Organizations*, Clive Archer berpendapat bahwa Organisasi Internasional adalah sebuah organisasi yang memiliki struktur yang berkesinambungan serta pembentukan organisasi tersebut berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Organisasi internasional tidak berada dalam ruang hampa politik, karena organisasi internasional merupakan bagian dari sistem negara modern, lebih lagi bentuk dan juga aktivitas kelembagaan dalam organisasi internasional mencerminkan harapan serta ketakutan pemerintah negara bagian dalam sistem itu (Archer, 2001).

Anthony Judge (1995) mencantumkan delapan kriteria yang termasuk kedalam ruang organisasi internasional, diringkas sebagai berikut:

1. Tujuannya harus benar-benar dalam skala internasional dengan maksud untuk mencakup setidaknya tiga negara.
2. Keanggotaan harus berupa partisipasi individu atau kolektif, dengan hak suara penuh, dari setidaknya tiga negara anggota dan harus terbuka untuk individu atau entitas mana pun yang memenuhi syarat dengan tepat di area operasi organisasi. Pemungutan suara harus sedemikian rupa sehingga

tidak ada satu kelompok nasional pun yang dapat mengendalikan organisasi.

3. Konstitusi harus menyediakan struktur formal yang memberikan hak kepada anggota secara berkala untuk memilih badan dan pejabat yang memimpin. Ketentuan harus dibuat untuk kelangsungan operasi dengan markas permanen.
4. Petugas yang menjabat tidak boleh memiliki kewarganegaraan yang sama selama lebih dari periode tertentu.
5. Harus ada kontribusi substansial untuk anggaran dari setidaknya tiga negara anggota dan tidak boleh ada upaya untuk membuat keuntungan untuk dibagikan kepada anggota.
6. Mereka yang memiliki hubungan organik dengan organisasi lain harus menunjukkan bahwa mereka dapat berdiri sendiri dan memilih pejabat mereka sendiri.
7. Bukti aktivitas terkini harus tersedia
8. Ada beberapa kriteria negatif: ukuran, politik, ideologi, bidang kegiatan, alokasi geografis kantor pusat, nomenklatur tidak relevan dalam memutuskan apakah suatu organisasi merupakan 'organisasi internasional' atau bukan.

Bennet (1977) mencatat karakteristik umum dari Organisasi Internasional sebagai:

1. Organisasi permanen untuk menjalankan serangkaian fungsi yang berkelanjutan;
2. Keanggotaan sukarela dari pihak yang memenuhi syarat;

3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasi;
4. Suatu badan konsultatif yang mewakili secara luas;
5. Sekretariat tetap untuk menjalankan fungsi administrasi, penelitian dan informasi yang berkesinambungan.

Pierre Gerbet (1977) memberi kesimpulan bahwa ide organisasi internasional adalah hasil dari upaya untuk menertibkan hubungan internasional dengan membangun ikatan yang langgeng melintasi perbatasan antara pemerintah atau kelompok sosial yang ingin mempertahankan kepentingan bersama mereka, dalam konteks badan permanen, berbeda dari lembaga nasional, memiliki karakteristik individu sendiri, yang mampu mengekspresikan keinginan mereka sendiri dan yang berperan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang penting secara internasional (Archer, 2001).

2.2.5 Konsep Peran

Dalam dunia internasional, dapat kita lihat dari teori peran yang didasarkan pada analisis politik. Pemikiran Jhon Wahlke, tentang teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi (John C. Wahlke, 1971). Dijelaskan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Teori peran atau role adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional dimana tindakan ini dilakukan oleh organisasi atau negara dan aktor lainnya yang telah menduduki suatu posisi tertentu, untuk menangani masalah yang terkait dengan bidangnya (Soerjono, 2002).

Peran merupakan seperangkat yang diharapkan akan dimiliki oleh seseorang maupun kelompok yang akan menduduki suatu posisi di kehidupan masyarakat. Adapun peran organisasi internasional di dalam hubungan internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori (Perwita, 2006), yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai arena atau tempat pertemuan bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan atau membahas masalah-masalah yang dihadapi.
2. Organisasi Internasional sebagai instrumen yang digunakan oleh negaranegara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
3. Organisasi internasional sebagai aktor independen yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi kekuasaan ataupun paksaan dari luar organisasi tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya WFP sebagai organisasi internasional yang bertugas untuk menangani krisis pangan dapat membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Dalam menangani krisis pangan di Ghana dapat dilihat dengan jelas sesuai fungsinya WFP mempunyai peran penting dalam menangani krisis pangan tersebut. Dalam hal ini WFP membantu Ghana agar dapat keluar dari masalah krisis pangan yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya dimana krisis ini menyebabkan terjadinya kelaparan dan juga telah menyebabkan kematian yang sebagian besar disebabkan akibat gizi buruk yang dialami oleh masyarakat Ghana.

2.2.7 World Food Programme (WFP)

World Food Programme (WFP) adalah sebuah organisasi antar pemerintah internasional. WFP juga merupakan sebuah organisasi penyelesaian masalah kemanusiaan terbesar di dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). World Food Programme (WFP) memiliki tujuan untuk mengakhiri kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan. Kantor pusat WFP berada di Roma, Italia dan memiliki 80 atau lebih kantor yang tersebar di seluruh dunia. WFP secara resmi didirikan di bawah kepresidenan John F. Kennedy yang mana merupakan Presiden ke-35 Amerika Serikat. Berdirinya World Food Program (WFP) yang berkembang pesat menjadikan WFP sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di dunia. Dalam jalannya organisasi ini, tidak lepas dari peran vital Direktur Utama Food For Peace dalam menjalankan tugasnya.

World Food Programme (WFP) memberikan bantuan pangan kepada rata-rata 80 juta orang di berbagai negara, yang tersebar pada 75 negara setiap tahunnya. Bantuan pangan sangat penting bagi WFP untuk memenuhi misinya sebagai organisasi kemanusiaan, karena bantuan pangan tersebut ditujukan kepada individu dan keluarganya yang tidak mampu memproduksi atau menerima pangan secara lengkap dan tepat. Dalam misinya, WFP mendistribusikan dan memberikan bantuan kepada negara-negara yang terkena dampak konflik domestik, orang-orang yang tinggal di negara yang tidak pernah terkena dampak dari konflik berbeda dengan orang-orang yang tinggal di negara yang terkena dampak dari konflik, karena adanya besar kemungkinan orang-orang tersebut tidak mendapatkan cukup pangan sehingga menyebabkan kebanyakan orang-orang

tersebut mengalami kekurangan gizi. WFP dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2020 atas upayanya mengurangi kelaparan dan memfasilitasi perdamaian di daerah yang terkena dampak konflik. WFP mendukung 97 orang yang merupakan angka dengan jumlah terbesar di 88 negara pada tahun 2012. WFP secara resmi didirikan sebagai misi bersama UN-FAO untuk memberantas kelaparan dunia. Majelis Umum PBB menetapkan tanggal pendirian WFP pada 24 November 1961, dengan Direktur Eksekutif WFP pertama dari Belanda yakni Addeke Hendrik Boerma yang memimpin WFP dari Mei 1962 hingga 5 Desember 1967.

World Food Programme banyak memiliki rencana untuk kerangka kerja yang operasional. Pada intinya rencana World Food Programme 2019-2023 ini mempunyai tiga fokus tujuan (WFP Country Strategic Plan, 2018), yaitu:

1. Menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian dalam keadaan darurat.
2. Mendukung ketahanan pangan dan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
3. Mengurangi risiko dan memungkinkan orang, komunitas, dan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mereka sendiri.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis atau konseptual yang sudah dipaparkan oleh penulis, penulis membuat suatu hipotesis atau dugaan sementara dari pembahasan permasalahan yang diteliti oleh peneliti yang akan diuji kebenarannya dengan data yang sudah diperoleh oleh peneliti. Adapun hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti adalah “Peran World Food Programme

(WFP) memiliki dampak positif dalam menangani krisis pangan di Ghana dengan memberikan bantuan pangan dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.”

2.4 Kerangka Analisis

